

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, Kencana, Jakarta.
- Bassiouni, M. Cherif, 1978, *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illionis, USA
- Dunn, William, 1998, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Husein, Yunus. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. PSHK. Jakarta.
- International Annals of Criminology*, 1988.
- Lindy Muzila, dkk.. 2012. *On the Take Criminalizing illicit Enrichment to Fight Corruption*. UNODC-World Bank. Washington.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mulder, A. 1980, *Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent*
- Ramelan, dkk.. 2012. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Sinar Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Sri Mamudji, dkk.. 2005. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sujono, 2020, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Suryosumpeno, Chuck, 2020, *Rezim Pemulihan Aset: Antara DIBenci dan Dibutuhkan*, REQbook, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtarina, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Theodore S. Greenberg, dkk.. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. World Bank. Washington DC.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Jurnal

Istiqomah, Milda. 2016. *Kebijakan Formulasi Pengaturan “Illicit Enrichment” Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Media Hukum, 23(1), 81.

Sianturi, Petrus Richard. 2020. *Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Simbur Cahaya, 27(1), 33.

Makalah/Skripsi/Tesis

Hutagalung, Beery. 2016. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas Medan Area. Medan.

Saputra, Refki. 2017. Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. Risetpublik.com. Universitas Bung Hatta. Sumatera Barat.

Porajow, David Fredriek Albert. 2013. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Nugraha, X., Katherina, A. M. F., Agustin, W., & Pamungkas, A. 2019. *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA *STOLEN ASSET RECOVERY* TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 29-58.

Abd Razak Musahib, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, e-Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 1, Januari 2015

Seminar

Yusuf, Muhammad. 2014. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Delik Korupsi*. Disampaikan Dalam National Workshop, Jakarta, 18 Februari 2014.

Internet

Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2021. Program Legislasi Nasional 2020-2024. <http://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>. 27 Maret 2021 pukul 11.40.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2017. Mengenal LHKPN. <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara/mengenal-lhkpn>. 30 Maret pukul 11.45.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2017. FAQ: Lain-lain. <http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara/faq/177-statistik/lhkpn/faq>. 30 Maret 2021 pukul 9.44.

Pengadilan Negeri Majalengka. 2021. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). http://www.pn-majalengka.go.id/html/laporan_harta_kekayaan_pejabat_negara_lkhpn.html. 30 Maret 2021 pukul 11.40.

Liz Campbell, “The Recovery of “Criminal” Asset in New Zealand, Ireland and England: Fighting Organised and Serious Crime in The Civil Realm” (makalah ini disampaikan pada Society of Legal Scholars Annual Conference, 2008), hlm. 22.